PENGARUH PENAGIHAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (SURVEI PADA KPP WILAYAH DJP JAWA BARAT I)

THE INFLUENCE OF TAX COLLECTION ON TAXPAYER COMPLIANCE AND THE IMPLICATION ON TAX REVENUE (*SURVEY AT* KPP WILAYAH DJP JAWA BARAT I)

Disusun Oleh:
Helga Fahresi 2.11.10.116
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The role of taxes in the state development is becoming increasingly important, especially during the economic crisis, the main factor of state revenue comes from taxes. Tax revenue can be derived from the repayment of the taxpayer in tax arrears as well as how the tax compliance in the return of SPT. The purpose of this study was to determine the effect of the tax collection and tax compliance increases tax revenue in the Tax Office DJP West Java I.

The method used in this research is descriptive and verification. Descriptive method is used to describe each variable while verification to find the relationship between tax collection and tax compliance in tax revenue. To determine the influence between variables used statistical tests, the test statistic used is the calculation of correlation person, the coefficient of determination, hypothesis testing using SPSS 20.0 software for windows.

The results of this study indicate that the collection of tax on tax compliance effect is very weak, tax compliance to tax revenues and the effect is very weak tax collection to tax revenues was a very weak effect. This study provides empirical evidence that tax collection has no significant effect on tax compliance and tax revenue implications for the Regional Tax Office DJP West Java I.

Keywords: Tax Collection, Taxpayer Compliance, Tax Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan dan dalam rangka mewujudkan tujuan utama suatu Negara yaitu untuk mensejahterakan kehidupan bangsa dan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan merata melalui pembangunan secara bertahap, terarah, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Semua tujuan tersebut tidak akan dapat terselesaikan dengan memperhatikan semua pembiayaan pembangunan tersebut. Terdapat berbagai sumber penghasilan suatu negara (Public Revenues), antara lain kekayaan alam, laba perusahaan negara, royalty, retribusi, kontribusi, bea, cukai, denda dan pajak. Salah satu sumber pendapatan pemerintah yang cukup potensial adalah melalui pajak (Nurmantu, 2003).

Terdapat dua fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend,* sedangkan fungsi tambahannya ada tiga adalah fungsi demokrasi, fungsi redistribusi, dan fungsi stabilitas. Fungsi *budgetair* memiliki kegunaan untuk memberi pemasukan bagi kas negara sebagai biaya untuk pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan namun jika terdapat sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. Fungsi *regulerend* memiliki kegunaan sebagai pengatur bagi usaha-usaha pemerintah untuk turut berpartisipasi dalam segala bidang yang bertujuan menyelenggarakan target-target lain yang ingin dicapai diluar bidang keuangan atau sektor swasta, seperti untuk

merangsang investor asing maupun nasional untuk menanam modalnya di Indonesia. Fungsi demokrasi memiliki kegunaan bagi wajib pajak yang telah membayar pajak namun tidak mendapatkan pelayanan (prestasi) yang semestinya untuk mengajukan protes (complaint) kepada pemerintah. Fungsi redistribusi memiliki kegunaan untuk menimbulkan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat dalam membayar pajak (Siti kurnia Rahayu,2010).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya self assessment system agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan yaitu pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu Negara (Euphrasia, 2010). Terganggunya penerimaan pajak akan mempengaruhi tiga aspek penting secara terintegrasi, yaitu: ekonomi, politik dan sosial (Eddy Wahyudi, dkk., 2009:69)

Penagihan penagihan pajak bertujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak (Titin Vigirawati, 2011). Surat Tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak (Ilyas dan Burton, 2008:47).

Besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubunganya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh terhadap kewajibanya untuk membayar pajak dan dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan tepat sesuai dengan target yang dicapai (Desi Handayani, 2008). Dari 26% tingkat kepatuhan wajib pajak badan (perusahaan) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan perdagangan termasuk yang paling patuh membayar pajak. Kendati begitu, persentase tersebut masih terbilang kecil mengingat wajib pajak di Jabar dari sektor badan sekitar 90.000 badan (Adjat Jatmika, 2012). Sampai saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Sejauh ini, baru 40 persen WP yang mengembalikan Surat Tagihan Pajak (STP) (Adjat Djatnika, 2012).

Adapun fenomena penagihan pajak terhitung sejak 2008 hingga pertengahan 2009, tercatat tunggakan pajak daerah dari para wajib pajak di Kota Bandung mencapai lebih dari Rp 4 miliar. Berdasarkan data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung, dari total pajak daerah pada 2008 lalu sebesar Rp 2,8 miliar, baru tertagih Rp 1,1 miliar atau Rp 1,7 miliar belum terbayarkan (Rachmat Setiadi, 2009). Agar penerimaan pajak pada tahun 2011 sesuai dengan target maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengintensifkan penagihan pajak hingga pemblokiran rekening bank bagi wajib pajak individu dan perusahaan yang membandel, langkah ini dilakukan hingga akhir tahun 2011 sebagai upaya mencapai target penerimaan pajak (Dedi Rudaedi, 2011). Wajib pajak badan menunggak pajak selama tiga tahun, sejak tahun 2012 hingga Agustus 2014. Tahun 2012, tunggakan pajak sebesar Rp 4,2 miliar sudah dibayar Rp 2,2 miliar, tersisa Rp 2 miliar. Tahun 2013, tunggakan sebesar Rp 3,8 miliar dan tahun 2014 belum ada setoran sama sekali. Hingga Juli 2014, rata-rata tunggakan pajak berkisar Rp 250-300 juta per bulan.(Fauzan Husniadi, 2014)

Adapun fenomena penerimaan pajak kondisi krisis global pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2012 tidak mencapai target (Agus Martoewardjo, 2013). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I menargetkan penerimaan pajak pada tahun ini mencapai Rp13,7 triliun atau naik 12% bandingkan dengan target tahun lalu sebesar Rp12,2 triliun. Kepala Kanwil DJP Jabar I, mengatakan beberapa strategi untuk meningkatkan setoran pajak antara lain dengan meningkatkan rasio kepatuhan wajib pajak (WP) dan menjaring WP baru.

Realisasi penerimaan pajak pada 2010 memang tidak maksimal, hanya 95% dari target. Selain itu, rasio kepatuhan pengembalian SPT-nya pun hanya 50% (Dedi Rudaedi, 2011). selain itu Ditjen Pajak juga melakukan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Ditjen Pajak juga mengoptimalkan pemanfaatan data internal maupun eksternal seperti data yang telah tersedia dalam basis data Ditjen Pajak (Dedi Rudaedi, 2011).

Saat ini penerimaan dari sektor pajak cenderung terus menurun meskipun jumlah wajib pajak terus meningkat. Dengan rasio pajak yang stagnan di angka 12,5 persen, (Bambang Widjojanto, 2014). Penerimaan negara dalam Rancangan APBN-P 2014 dipatok Rp 1.597,7 triliun, merosot Rp 69,4 triliun dari asumsi APBN 2014 yang sebesar Rp 1.667,1 triliun. Peneriman pajak direvisi dari Rp 1.280,4 triliun menjadi Rp 1.232,1 triliun, dengan rasio pajak yang ikut terpangkas dari 12,35 persen menjadi 12,24 persen. Pajak yang menurun karena pertumbuhan ekonomi yang melambat. Kemudian ada efek dari harga komoditas, harga minyak (Chatib Basri, 2014).

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di KANWIL JABAR I.
2. Seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di KANWIL JABAR I.
3. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di KANWIL JABAR I.
4. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak secara simultan pada KPP di KANWIL JABAR I

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP di KANWIL JABAR I.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di KANWIL JABAR I.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP di KANWIL JABAR I.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak secara simultan

Kegunaan Penelitian

Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi KPP di KANWIL JABAR I.
   Untuk memberikan informasi serta memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan impilikasinya pada penerimaan pajak.
2. Bagi Karyawan KPP di KANWIL JABAR I bagian penagihan
   Memberikan informasi serta memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan

impilikasinya pada penerimaan pajak. sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masing-masing.

Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan ilmu
   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan impilikasinya pada penerimaan pajak.
2. Bagi peneliti yang akan datang
   Bagi peneliti yang akan datang penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan impilikasinya pada penerimaan pajak

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Penagihan Pajak

Menurut **Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245)** penagihan pajak adalah sebagai berikut :

> "Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Surat Tagihan Pajak (STP)

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP).

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:186)** yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak (STP).

> "Surat Tagihan Pajak (STP) adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Siti kurnia (2010 : 138)** kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Menurut **Simanjuntak Timbul (2012 : 84)** kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

> "Kepatuhan Wajib Pajak adalah menyangkut sejauh mana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku".

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut **Euphrasia Susy Suhendra (2010)** rasio kepatuhan wajib pajak dapat diukur sebagai berikut :

> "Diukur berdasarkan Jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan membandingkan dengan jumlah wajib pajak efektif".

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010: 171)** Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

> "Dokumen yang menjadi alat kerja sama antara wajib pajak dan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang".

Penerimaan Pajak

Menurut pendapat **Siti Kurnia Rahayu (2010:52-54)** penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

> "Penerimaan pajak merupakan Pelaksanaan pemerintah di negara manapun hanya dapat dilaksanakan dengan adanya unsur pendukung yang salah satunya adalah tersedianya dana, guna pembiayaan fungsi pemerintah secara optimal. Sumber dana

tersebut diperoleh dari pajak, hasil penjualan barang dan jasa oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko). Maka secara sederhana penerimaan negara dibedakan atas penerimaan pajak dan bukan pajak"

Indikator Penerimaan Pajak

Menurut pendapat **John Hutagaol (2007 : 8)** penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

"Penerimaan Pajak adalah pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan dan administrasi perpajakan"

Menurut **Abdul Halim (2002 : 130)** rasio penerimaan pajak dapat diukur sebagai berikut:

"Perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan rencana pajak yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya"

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut pendapat **Gatot S.M. Faisal (2009:225)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Di samping bertujuan untuk mencairkan tunggakan pajak, tindakan penagihan pajak dengan surat paksa juga merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak".

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Menurut pendapat **Simanjuntak (2012 : 204)** tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara".

Menurut pendapat **Siti Kurnia Rahayu (2006 : 111)** tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Jika semua wajib pajak di Indonesia berpredikat patuh maka akan berimplikasi pada optimalisasi penerimaan Pajak. Maka efeknya pada penerimaan negara yang bertambah besar".

Menurut hasil penelitian **John Hutagaol (2007)** tingkat kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Pada akhirnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh pada penerimaan Negara dari sektor pajak (*tax revenue*) karena bila kepatuhan wajib pajak meningkat dalam artian melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku maka *tax coverage ratio* akan meningkat dan juga realisasi penerimaan pajak".

Menurut hasil penelitian **Arya Pradipta (2007)** kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu kunci keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak".

Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Menurut pendapat **Soemarso S.R (2007:3)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

"Kewajiban Pajak muncul pada sisi wajib pajak, karena undang-undang kewajiban ini harus dipenuhi jika tidak dipenuhi undang-undang akan memberikan hak kepada negara untuk memaksa, tindakan memaksa tercantum pada pasal-pasal yang menyangkut penagihan pajak. tujuan dari dicantumkannya pasal-pasal penagihan pajak adalah untuk memastikan bahwa penerimaan pajak oleh negara dapat dipenuhi".

Menurut hasil penelitian **Zakiah M Syaha (2008)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut

> "Penagihan pajak baik secara simultan maupun parsial berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan"

Menurut hasil penelitian **Titin Vergira (2011)** penagihan pajak mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak dijelaskan sebagai berikut:

> "Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada hubungan korelasional negative yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak. Semakin banyak surat Tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya menjadi kecil, tapi bila sedikit jumlah penerbitan surat tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya besar. Penerbitan Surat Tagihan pajak dapat dijadikan indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak".

Hipotesis

Menurut **Sugiyono (2011:9)** mengatakan bahwa pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data".

Berdasarkan pengertian hipotesis dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan hipotesis sebagai berikut :

- H_1 : Penagihan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
- H_2 : Kepatuhan wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
- H_3 : Penagihan pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.
- H_4: Penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara simultan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada KPP di KANWIL JABAR I.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Metode deskriptif menurut **Sugiyono (2011:147)** adalah sebagai berikut:

> "Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi".

Menurut **Mashyuri (2009:45)** pengertian metode verifikatif adalah sebagai berikut:

> "Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan".

Desain Penelitian

Menurut **Moh. Nazir dalam Umi Narmawati (2011:30)** adalah sebagai berikut:

> "Desain Penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian".

Menurut **Sugiyono (2011:50)** menjelaskan proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sumber masalah
2. Rumusan masalah
3. Konsep dan teori yang relevan dan penemuan yang relevan
4. Pengajuan hipotesis
5. Metode penelitian
6. Menyusun instrumen penelitian
7. Kesimpulan.

Operasionalisasi Variabel

Menurut **Sugiyono (2009:2)** menjelaskan variabel penelitian adalah sebagai berikut:

> "Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya".

Maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua

1. Variabel Independen
   Menurut **Sugiyono (2010: 39)** variabel bebas adalah sebagai berikut:
   "Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)."
   Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Penagihan Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).
2. Variabel Dependen (Z).
   Menurut **Sugiyono (2010: 39)** variabel dependen adalah sebagai berikut:
   "Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas".

Sumber Data

Menurut **Sugiyono (2011:136)** mendefinisikan sumber data sekunder adalah sebagai berikut :

> "Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku serta dokumen perusahaan."

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan yaitu jumlah lembar dan jumlah rupiah untuk data penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak berupa angka pada KPP di KANWIL JABAR I.

Alat Ukur Penelitian

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Menurut **Sugiyono (2009:8)** Analisis jalur adalah sebagai berikut :

> "Mengkaji hubungan sebab akibat yang bersifat struktural dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan mempertimbangkan keterkaitan antar variabel independen".

Populasi Dan Penarikan Sampel

Populasi

Menurut **Sugiyono (2013: 49) populasi** adalah sebagai berikut:

> "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek pajak/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Sesuai dengan judul penelitian yaitu " Pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak" Maka populasi untuk masing-masing variabel terdiri dari :

a. Penagihan Pajak
   Populasi untuk variabel Penagihan pajak (X) dalam penelitian ini adalah jumlah STP yang diterbitkan oleh 9 KPP di KANWIL JABAR I selama 3 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2012.
b. Kepatuhan Wajib Pajak
   Populasi untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dalam penelitian ini adalah jumlah SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak badan oleh 9 KPP di KANWIL JABAR I selama 3 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan 2012.
c. Penerimaan Pajak
   Populasi untuk variabel Penerimaan Pajak (Z) dalam penelitian ini adalah jumlah realisasi penerimaan pajak dan rencana penerimaan pajak pada tahun 2010 sampai dengan 2012 pada 9 KPP di KANWIL JABAR I.

Sampel

Menurut **Sugiyono (2013: 49)** menyatakan bahwa pengertian sampel adalah sebagai berikut:

"Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi itu".

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *sampling purposive*
Menurut **Sugiyono (2012: 85)** pengertian *sampling purposive* adalah sebagai berikut:

"*Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu"

Sampel dalam penelitian ini adalah data-data berupa jumlah lembar surat tagihan pajak (STP), Jumlah wajib pajak efektif, Jumlah surat pemberitahuan (SPT), rencana penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2010-2012 yang terdapat di 9 KPP yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut **Sugiyono (2013:62)** adalah sebagai berikut:

"Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data".

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan dua cara, yaitu studi lapangan (*Field Research*) dan studi kepustakaan *(Library Research).*

1. Studi Lapangan (*Field Research*)
   Penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan pada KPP di KANWIL JABAR I , ada beberapa langkah antara lain:
   a. Observasi
      Peneliti datang langsung ke Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu ke Bagian P2 Humas.
   b. Wawancara
      Cara pengumpulan data yang dilakukan langsung melalui tanya jawab antara penulis dengan petugas yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
   c. Dokumentasi
      Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Adapun dokumen-dokumennya adalah jumlah lembar dari penerbitan Surat tagihan pajak (STP), jumlah SPT Tahunan dan penerimaan pajak pada KPP di KANWIL JABAR I.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)
   Pengambilan data yang bersifat teori yang kemudian digunakan sebagai literatur penunjang guna mendukung penelitian yang dilakukan. Data ini diperoleh dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan acuan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Metode Pengujian Data

Rancangan Analisis

Menurut **Umi Narimawati (2010: 41)** mendefinisikan rancangan analisis adalah sebagai berikut:

"Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain".

Peneliti melakukan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis kuantitatif. Adapun menurut **Sugiyono (2010: 31)** analisis kuantitatif adalah sebagai berikut:

"Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random".

Selanjutnya analisis yang digunakan dalam metode penelitian verifikatif adalah :

a. Koefisien Korelasi
b. Koefisien Jalur
   Setelah menghitung koefisien korelasi kemudian menghitung koefisien jalur. Koefisien jalur diperoleh menggunakan rumus korelasi *Pearson Product Moment* sebagai berikut:
   $P_{YX} = r_{XY}$

c. Koefisien Determinasi

$$KD = r^2 \text{ X } 100\%$$

Sumber: Umi Narimawati dkk (2010: 50)

Keterangan:
KD = Koefisien Determinasi
r = Koefisien Korelasi
100% = Pengali yang menyatakan persentase

d. Tingkat Signifikansi
   Setelah diketahui kekuatan hubungan antar variabel, kemudian ditentukan apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak dengan melakukan uji signifikansi. Tingkat signifikan yang dipilih dalam penelitian ini adalah 0,05 (5%) karena dinilai cukup mewakili pengaruh antara variabel dan merupakan tingkat signifikan yang umum digunakan dalam penelitian. Tingkat signifikansi 0,05 (5%) artinya kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan mempunyai probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Penagihan Pajak

1. Pada tahun 2010 Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) rata-rata sebanyak 794 lembar yang di terbitkan pada 9 KPP, jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) tertinggi terdapat di KPP Pratama Bojonagara yaitu sebanyak 1.435 lembar dan terendah terdapat di KPP Pratama Sumedang sebanyak 2 lembar.
2. Pada tahun 2011 Jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) rata-rata sebanyak 1602 lembar yang diterbitkan pada 9 KPP,jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) tertinggi terdapat di KPP Bandung Karees yaitu sebanyak 3.762 lembar dan terendah terdapat di KPP Pratama Sumedang yaitu sebanyak 208 lembar. Mengalami kenaikan sebesar 808 lembar STP

Terbit dari tahun 2010 disebabkan semakin meningkatnya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak maupun dalam membayar tunggakan pajak.

3. Pada tahun 2012 Jumlah Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan rata-rata sebanyak 2046 lembar, jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) tertinggi terdapat di KPP Pratama Bandung Cicadas yaitu sebanyak 3.685 lembar dan terendah terdapat di KPP Pratama Sumedang yaitu sebanyak 809 lembar. Mengalami kenaikan sebesar 444 Lembar STP Terbit dari tahun 2011 hal tersebut disebabkan masih banyaknya wajib pajak yang menunggak pajak dan mengakibatkan penerimaan pajak berkurang, kewajiban wajib pajak untuk melunasi penunggakan pajak Oleh karena itu petugas pajak harus lebih giat lagi melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak yang tidak patuh. Semakin giat dilakukan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pada tahun 2010 rasio kepatuhan wajib pajak memiliki rata-rata 49% tertinggi terdapat di KPP Pratama Bandung Tegallega yaitu sebesar 64,39% dan terendah terdapat di KPP Pratama Bandung Cimahi yaitu sebesar 34,11%.
2. Pada tahun 2011 rasio kepatuhan wajib pajak rata-rata 45% dan tertinggi terdapat di KPP Pratama Bandung Sumedang yaitu sebesar 68,28% dan terendah terdapat di KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu sebesar 25,29%. Mengalami penurunan sebesar 4% dari tahun 2010 hal tersebut disebabkan kepatuhan wajib pajak masih terbilang rendah dalam mengembalikan SPT,
3. Pada tahun 2012 rasio kepatuhan wajib pajak meningkat sebesar 54% tertinggi terdapat di KPP Pratama Bandung Sumedang yaitu sebesar 59,74% dan terendah terdapat di KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu sebesar 45,64%. Mengalami peningkatan sebesar 9% dibandingkan dengan tahun 2011, hal tersebut disebabkan kesadaran wajib pajak mulai meningkat dalam pengembalian SPT sehingga potensi penerimaan pajak meningkat, karena semakin giat wajib pajak patuh dalam pengembalian SPT akan meningkatkan penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak

1. Pada tahun 2010 rasio penerimaan diukur dengan Realisasi Penerimaan pajak berbanding Rencana Penerimaan pajak memiliki rata-rata sebesar 106% tertinggi terdapat di KPP Pratama Garut yaitu sebesar 113,49% dan terendah terdapat di KPP Pratama Bandung Karees yaitu sebesar 87,41%.
2. Pada tahun 2011 rasio penerimaan pajak rata-rata sebesar 91% tertinggi terdapat di KPP Pratama Soreang yaitu sebesar 110,26% dan terendah terdapat di KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu sebesar 81,75%. Mengalami penurunan sebesar 15% hal ini disebabkan banyaknya wajib pajak yang menunggak dan keterlambatan dalam pengembalian SPT sehingga potensi penerimaan pajak pun menurun.
3. Pada tahun 2012 rasio penerimaan pajak rata-rata sebesar 103% tertinggi terdapat di KPP Pratama Bandung Soreang yaitu sebesar 119,57% dan terendah terdapat di KPP Pratama Bandung Karees yaitu sebesar 83,68%.Mengalami kenaikan sebesar 12 % dari tahun 2011 hal tersebut disebabkan mulai meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam pengembalian SPT serta dalam membayar tunggakan pajak sehingga potensi penerimaan pajak pun meningkat.

Analisis Verifikatif

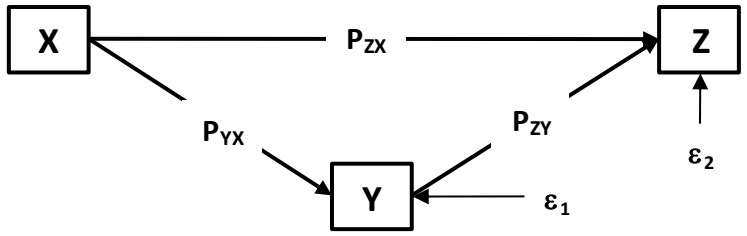


Diagram Jalur Paradigma Penelitian

Gambar diagram jalur seperti terlihat diatas dapat diformulasikan kedalam 2 bentuk persamaan struktural sebagai berikut :

Persamaan Jalur Sub Struktur Pertama

$\mathbf{Y = P_{YX}X + \varepsilon_1}$

Persamaan Jalur Sub Struktur Kedua

$\mathbf{Z = P_{ZX}X + P_{ZY}Y + \varepsilon_2}$

Keterangan:

Z = Penerimaan pajak
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X = Penagihan pajak
$\mathbf{P_{YX}}$ = Koefisien jalur Penagihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak
$\mathbf{P_{ZX}}$ = Koefisien jalur Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak
$\mathbf{P_{ZY}}$ = Koefisien jalur kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak
ε = Pengaruh faktor lain

Berdasarkan nilai koefisien korelasi hubungan antara penagihan pajak (X) dengan kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar -0,149 dan masuk dalam kategori sangat rendah. Arah hubungan negatif antara penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak menujukkan bahwa semakin tinggi rasio penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan penurunan rasio kepatuhan wajib pajak. Kemudian hubungan antara kepatuhan wajib pajak (Y) dengan Penerimaan pajak (Z) sebesar 0,332 termasuk dalam kategori lemah namun dengan arah positif, yang berarti semakin tinggi kepatuhan wajib pajak maka penerimaan pajak akan semakin tinggi pula dan hubungan penagihan pajak (X) antara Penerimaan pajak (Z) sebesar -0,072 kategori sangat rendah arah hubungan negatif yang menunjukkan semakin tinggi penagihan pajak maka penerimaan pajak semakin rendah.

Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Pertama (Penagihan Pajak (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y))

1. Menghitung Koefisien Jalur
   Karena variabel independen hanya satu variabel (penagihan pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.
   $(\mathrm{P_{yx}}) = \mathrm{r_{xy}} = (-0,149)$
2. Menghitung Koefisien Determinasi
   $R^2_{YX} = (P_{Yx})^2 = (-0,149)^2 = 0,022$ X100%= 2,2%

   Nilai koefisien determinasi dinterpretasikan sebagai besar kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penagihan pajak hanya memberikan pengaruh sebesar 2,2% terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I, sedangkan sisanya sebesar 97,8%

merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar penagihan pajak, seperti kualitas pelayanan perpajakan, pemeriksaan pajak dan lainnya.

3. Pengujian Hipotesis
   Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh koefisien jalur penagihan pajak terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,149 dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,756. Kemudian dari tabel t pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 25 untuk pengujian dua arah diperoleh t_{tabel} sebesar 2,060. Karena nilai t_{hitung} jalur penagihan pajak (-0,756) lebih kecil dari negatif t_{tabel} (-2,060), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima Ho sehingga Ha ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak (X) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I**.**

Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Kedua (Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Terhadap Penerimaan Pajak (Z))

1. Menghitung Koefisien Jalur
   Karena variabel intervening hanya satu (kepatuhan wajib pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur.
   $(\mathrm{P_{Zy}}) = \mathrm{r_{yz}} = (0,332)$

2. Menghitung Koefisien Determinasi
   KD $= \mathrm{r^2_{YZ}\ X\ 100\%} = (0{,}332)^2\ \mathrm{X\ 100\%} = 11\%$
3. Pengujian Hipotesis
   Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh koefisien jalur kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,332 dengan nilai t_{hitung} sebesar 1.760. Kemudian dari t_{tabel} pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 25 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,060. Karena nilai t_{hitung} jalur kepatuhan wajib pajak 1,760 kurang dari t_{tabel} 2,060, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menerima Ho sehingga Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat

Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Ketiga (Penagihan Pajak (X) Terhadap Penerimaan Pajak (Z))

1. Menghitung Koefisien Jalur
   Karena variabel independen hanya satu variabel (penagihan pajak), maka nilai koefisien korelasi sekaligus menjadi koefisien jalur. $(\mathrm{P_{Zx}}) = \mathrm{r_{xz}} = (-0{,}072)$
2. Menghitung Koefisien Determinasi
   KD $= \mathbf{r^2_{xZ}\ X\ 100\%} = (-\mathbf{0,072})^{\mathbf{2}}\ \mathbf{X\ 100\%} = \mathbf{0,52\%}$
3. Pengujian Hipotesis
   Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh koefisien jalur penagihan pajak terhadap terhadap penerimaan Pajak sebesar -0,072 dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,362. Kemudian dari tabel t pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 25 untuk pengujian dua arah diperoleh t_{tabel} sebesar 2,060. Karena nilai t_{hitung} jalur penagihan pajak (-0,362) lebih kecil dari negatif t_{tabel} (2,060), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima Ho sehingga Ha ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I**.**

Pengujian Jalur Pada Sub Struktur Keempat (Penagihan Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Terhadap Penerimaan Pajak (Z)) secara Simultan

Hipotesis Statistik

Berdasarkan pengolahan diperoleh F_{hitung} sebesar 1.494 dengan nilai signifikansi sebesar 0,245. Nilai ini menjadi statistik uji yang akan dibandingkan dengan nilai F dari tabel dimana pada tabel F untuk α = 0.05 dan derajat bebas (2&24) diperoleh nilai F_{tabel} sebesar 3,403. Karena F_{hitung} (1.494) lebih kecil dibanding F_{tabel} (3,403) maka pada tingkat kekeliruan 5% (α=0.05) diputuskan untuk menerima Ho sehingga Ha ditolak. Artinya penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I**.**

Pembahasan

Pengaruh Penagihan Pajak (X) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Hasil penelitian menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh lemah terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat koefisien korelasi *pearson* sebesar -0,149 dengan arah Negatif. Arah hubungan negatif antara penagihan pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak menujukkan bahwa semakin tinggi penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan penurunan rasio kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat wajib pajak yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan, rendahnya kepatuhan ini itu tidak hanya perorangan, melainkan wajib pajak perusahaan dan masih banyak tunggakan pajak yang belum tertagih (Agus Martowardjo : 2012) Permasalahan tersebut terjadi dilapangan yang dapat dilihat dari banyaknya jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan untuk periode tahun 2010-2012 (Tabel 4.2 : 72).

Besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 2,2 % pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, sedangkan sisanya sebesar 97,8% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar penagihan pajak, seperti kualitas pelayanan perpajakan, pemeriksaan pajak dan lainnya.

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh koefisien jalur penagihan pajak terhadap terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,149 dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,756. Kemudian dari tabel t pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 25 untuk pengujian dua arah diperoleh t_{tabel} sebesar 2,060. Karena nilai t_{hitung} jalur penagihan pajak (-0,756) masih lebih kecil dari negatif t_{tabel} (-2,060), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima Ho sehingga Ha ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I**.**

Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Terhadap Penerimaan Pajak (Z)

Hasil penelitian menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh lemah terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat koefisien korelasi *pearson* sebesar 0,332 dengan arah positif. Arah hubungan positif antaran kepatuhan wajib Pajak dengan penerimaan pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi kepatuhan wajib pajak cenderung akan diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar (Elia Mustika,2007). Dan teori yang mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan persoalan laten dan akrual yang sejak dulu ada di perpajakan, Untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak (Elia Mustika,2007)

Berdasarkan hasil pengolahan diperoleh pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 11% sementara sisanya 89% merupakan pengaruh faktor-faktor lain

diluar kepatuhan wajib pajak.koefisien jalur kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,332 dengan nilai t_{hitung} sebesar 1.760 Kemudian dari t_{tabel} pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 25 diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,060 Karena nilai t_{hitung} jalur kepatuhan wajib pajak 1.760 kurang dari t_{tabel} 2,060, maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan menerima Ho sehingga Ha ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I.

Pengaruh Penagihan Pajak (X) Terhadap Penerimaan Pajak (Z)

Hasil penelitian menyatakan bahwa penagihan pajak berpengaruh lemah terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan melihat koefisien korelasi *pearson* sebesar -0,072 dengan arah Negatif. Arah Negatif antara penagihan pajak dengan penerimaan pajak menunjukkan bahwa semakin tinggi penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan penurunan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa banyaknya wajib pajak yang menunggak akan mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal (Dedi Rudaedi, 2011). Besarnya pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 0,52% pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, sedangkan sisanya sebesar 99,48% merupakan pengaruh faktor-faktor lain diluar penagihan pajak, seperti kualitas pelayanan perpajakan, pemeriksaan pajak dan lainnya.

Hasil penelitian penagihan pajak terhadap penerimaan pajak adalah sebesar -0,072 dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,362 Kemudian dari tabel t pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 25 untuk pengujian dua arah diperoleh t_{tabel} sebesar 2,060. Karena nilai t_{hitung} jalur penagihan pajak (-0,362) masih lebih kecil dari negatif t_{tabel} (-2,060), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima Ho sehingga Ha ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I**.**

Pengaruh Penagihan Pajak (X) dan Kepatuhan Wajib (Y) Pajak Terhadap Penerimaan Pajak(Z)

Dalam penelitian ini bisa dilihat juga pengaruh penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak secara bersama-sama berpengaruh lemah terhadap penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan Dari 26% tingkat kepatuhan wajib pajak badan (perusahaan) sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan perdagangan termasuk yang paling patuh membayar pajak. Kendati begitu, persentase tersebut masih terbilang kecil mengingat wajib pajak di Jabar dari sektor badan sekitar 90.000 badan (Adjat Jatmika, 2012). Sampai saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Sejauh ini, baru 40 persen WP yang mengembalikan Surat Tagihan Pajak (STP) (Adjat Djatnika, 2012). Dan banyaknya wajib pajak yang menunggak akan mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal (Dedi Rudaedi, 2011). Penerimaan pajak mengakui kondisi krisis global yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan pajak pada tahun 2012 tidak mencapai target (Agus Martowardjo:2012).

Hasil penelitian penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan nilai F_{hitung} sebesar 1.494 Kemudian dari tabel F pada tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas 2 dan 24 untuk pengujian dua arah diperoleh F_{tabel} sebesar 3.403. Karena nilai F_{hitung} jalur penagihan pajak dan kepatuhanwajib pajak (1.494) masih lebih kecil dari f_{tabel} (3.403), maka pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menerima Ho sehingga Ha ditolak. Jadi berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I**.**

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena penagihan pajak memberikan pengaruh sangat lemah atau tidak dominan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kanwil Jawa Barat I. hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan masih banyak wajib pajak yang belum terdaftar, bahkan terdapat wajib pajak yang tidak membayar sesuai dengan ketentuan, rendahnya kepatuhan ini tidak hanya perorangan, melainkan wajib pajak perusahaan dan masih banyak tunggakan pajak yang belum tertagih.

2. Kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak karena kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sangat lemah atau tidak dominan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kanwil Jawa Barat I. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan masih rendahnya wajib pajak dalam pengembalian SPT sehingga penerimaan pajak rendah.

3. Penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya di Kanwil Jawa Barat I, karena Penagihan pajak memberikan pengaruh sangat lemah atau tidak dominan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa banyaknya wajib pajak yang menunggak akan mengakibatkan penerimaan pajak tidak optimal.
4. Penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya karena penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak memberikan pengaruh sangat lemah atau tidak dominan terhadap penerimaan pajak.

Saran

Saran Praktis

Diharapkan dengan penelitian ini bisa membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak PratamaMadya Wilayah DJP Jabar I dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dimana:

1. Penagihan pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib dan penerimaan pajak, maka diharapkan setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jabar I dapat: Seksi penagihan Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar I mampu menyeimbangkan antara penagihan tunggakan pajak dengan jumlah surat tagihan pajak dengan jumlah pelunasan tunggakan pajak sehingga pendapatan pajak meningkat yang secara tidak langsung dapat mendukung target penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak yang diidentifikasi dari besar kecilnya jumlah pelaporan SPT . Untuk itu, akan lebih baik lagi apabila Direktorat Jendral Pajak bisa meningkatkan lagi kepatuhan wajib pajak dengan menempuh cara lain, selain dengan memberikan kebijakan berupa sanksi kepastian hukum yang jelas dalam menentukan tarif denda Dengan begitu, diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Saran Akademis

a. Bagi pengembangan ilmu terkait pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya terhadap penerimaan pajak, penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya perpajakan.

b. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam hal yang sama, disarankan untuk menambah indikator ataupun variabel lain, metode yang sama ataupun berbeda tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya, baik oleh peneliti saat ini maupun oleh peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2002**.** *Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah* Edisi pertama , Salemba empat, Jakarta.

Asri Fika, 2008. *Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang di moderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama*. Jurnal simposium akutansi nasional, vol 12 Agustus 2008.

Chaizi Nasucha, 2004, *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Grasindo

Diaz priantara. 2012. *Perpajakan Indonesia* edisi 2 Jakarta : penerbit mitra wacana media.Jakarta.

Euphrasia Susy Suhendra. 2010. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Bada. *Jurnal Ekonomi Bisnis.* No. 1. Volume 15. p. *58-65.*

Gatot S.M Faisal. 2009. *How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana Menjadi Wajib Pajak :* Jakarta

Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto, 2011, *Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan Di Indonesia*, Visi Media, Jakarta.

Herman Purnawan. 2000. *Undang-Undang Perpajakan 2000*. Erlangga. Jakarta.

John Hutagaol, 2007 *Perpajakan : Isu isu Kontemporer,* Graha Ilmu : Yogyakarta

Mashuri dan M. Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian : Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung : Refika Aditama.

Panca Kurniawan dan Bagus pamungkas. 2006 *Penagihan Pajak di Indonesia*, Malang : Bayumedia Publishin

Safri Nurmantu. 2003. *Pengantar Perpajakan* : Granit

Siahaan. 2006 *Penerimaan pajak di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012 *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi,* Bogor: Penerbit Raih Asa Sukses.

Siti Kurnia Rahayu. 2010 Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Siti Resmi. 2009. *Perpajakan, Edisi Kelima.* Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Soemarso, S.R, 2007. *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Salemba Empat, Jakarta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2012. *Metode Penelitan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.

Sukirman. 2011. Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus: di KPP Semarang Timur). *Analisis Manajemen.* Vol. 5 No. 1. p. 87-101.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-45/PJ/2007

Soemarso S.R. 2007*Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta : Salemba Empat

Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaraan, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak. *Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4 No. 1. p. 105-121

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama. Bandung.

Umi Narimawati. (2008). *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Titin Vegirawati, Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*, Vol. 1 No.3, September 2011 : 266 – 274

Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat , Edisi Kedua

Zakiyah m syahab Dan Hantoro arief gistijanto, 2008 Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2008

http://jabar.tribunnews.com/2012/02/24/kepatuhan-wajib-pajak-masih-rendah

http://jabar.tribunnews.com/2012/03/14/kepatuhan-pajak-warga-bandung-hanya-42-persen, Rabu, 14 Maret 2012 16:17 WIB.

http://www.bisnis-jabar.com/index.php/berita/tingkat-kepatuhan-warga-jabar-bayar-pajak-masih-rendah, 12 Desember 2013 23:03 WIB.
http://www.pajak.go.id/content/ditjen-pajak-amankan-penerimaan-pajak-2011
http://www.tempo.co/ read/news/2011/06/06/ 063338994/KPK-
http://www.pajak.go.id/content/dirjen-pajak-penerimaan-pajak-2011-capai993persen,Rabu, 11 Januari 2012 - 14:56.
http://www.beritasatu.com/ekonomi/151417-dirjen-pajak-tiga-alasan-penerimaaanpajak rendah.html, Kamis, 21 November 2013 - 18:06.
http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12012&q=kup&hlm=18
http://www.tempo.co/read/news/2012/10/24/087437565/
http://www.tempo.co/read/news/2013/12/13/092537143/Ekonomi-Lesu-Penerimaan-Pajak-Jauh-dari-Target
http://health.kompas.com/read/2011/09/30/11543120/Tingkat.Kepatuhan.Pajak.Masyarakat

Lampiran 1

Tabel 1
Desain Penelitian

Tujuan Penelitian	Desain Penelitian			
	Jenis Penelitian	**Metode yang Digunakan**	**Unit Analisis**	***Time Horizon***
T-1	*Descriptive & Verificative*	*Verificative Survey*	KPP di KANWIL JABAR I	*Time Series*
T-2	*Descriptive & Verificative*	*Verificative Survey*	KPP di KANWIL JABAR I	*Time Series*
T-3	*Descriptive & Verificative*	*Verificative Survey*	KPP di KANWIL JABAR I	*Time Series*
T-4	*Descriptive & Verificative*	*Verificative Survey*	KPP di KANWIL JABAR I	*Time Series*

Lampiran 2

Korelasi Penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak
Correlations

		X	Y	Z
X	Pearson Correlation	1	-.149	-.072
	Sig. (2-tailed)		.457	.720
	Sum of Squares and Cross-products	2.527E7	-369.100	-197.385
	Covariance	9.718E5	-14.196	-7.592
	N	27	27	27
Y	Pearson Correlation	-.149	1	.332

	Sig. (2-tailed)	.457		.091
	Sum of Squares and Cross-products	-369.100	.241	.089
	Covariance	-14.196	.009	.003
	N	27	27	27
Z	Pearson Correlation	-.072	.332	1
	Sig. (2-tailed)	.720	.091	
	Sum of Squares and Cross-products	-197.385	.089	.295
	Covariance	-7.592	.003	.011
	N	27	27	27

Lampiran 3

Penagihan pajak terhadap kepatuhan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.149[a]	.022	-.017	.09717408381

a. Predictors: (Constant), X

Lampiran 3

Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.332[a]	.110	.075	.10252853414

a. Predictors: (Constant), Y

Lampiran 4

Penagihan Pajak terhadap penerimaan pajak

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.072[a]	.005	-.035	.10840892986

a. Predictors: (Constant), X

Lampiran 5

Penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.033	2	.016	1.494	.245[a]
	Residual	.263	24	.011		
	Total	.295	26			

a. Predictors: (Constant), Y, X

b. Dependent Variable: Z